

Pendekatan politik Sultan Abu Al-Mahasin dan Sultan Mahmud Badaruddin II di Lampung pada abad XVII dan XIX M

Political approach of Sultan Abu Al-Mahasin and Sultan Mahmud Badaruddin II towards the Lampungnese in XVII and XIX century CE

Muhamad Alnoza

Program Pascasarjana Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
muhamadalnoza@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:
Banten;
dalung;
Lampung;
Palembang;
piyagēm;
inscriptions

This study specifically aims to examine the power relations of the Sultan of Palembang (Sultan Mahmud Badaruddin II) in XIX century CE and the Sultan of Banten (Sultan Abu Al-Mahasin) in XVII century CE Lampung region based on *piyagēm* Natayuda and *dalung* Bojong inscriptions. This study describes the form of political messages of Sultan Mahmud Badaruddin II and Sultan Abu Al-Mahasin in relation to the approach taken by the two kingdoms to the people of Lampung. Based on the analysis results of the inscriptions, it can be seen that the Sultanate of Palembang was more oriented towards a hard power approach, while the Sultanate of Banten was oriented to a combination of hard power and soft power.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Banten;
dalung;
Lampung;
Palembang;
piyagēm;
prasasti

Kajian ini secara khusus bertujuan mengkaji relasi kuasa Sultan Palembang (Sultan Mahmud Badaruddin II) pada abad XIX dan Sultan Banten (Sultan Abu Al-Mahasin) pada abad XVII di wilayah Lampung berdasarkan *piyagēm* Natayuda dan *dalung* Bojong. Kajian ini membahas tentang bentuk pesan-pesan politis Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Abu Al-Mahasin dalam kaitannya dengan pendekatan yang dilakukan oleh kedua kesultanan tersebut kepada masyarakat Lampung. Berdasarkan hasil analisis data prasasti, dapat diketahui bahwa Kesultanan Palembang lebih berorientasi pada pendekatan yang bersifat *hard power*, sedangkan Kesultanan Banten berorientasi kepada perpaduan antara *hard power* dan *soft power*.

Artikel Masuk 13-02-2021
Artikel Diterima 05-10-2021
Artikel Diterbitkan 30-11-2021



**BERKALA
ARKEOLOGI**

VOLUME : 41 No. 2, November 2021, 215-232
DOI : [10.30883/jba.v4i2.732](https://doi.org/10.30883/jba.v4i2.732)
VERSION : Indonesian (original)
WEBSITE : <https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id>

ISSN: 0216-1419

E-ISSN: 2548-7132



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Lampung sejak masa awal sejarah hingga masa kolonial menjadi lahan strategis bagi berbagai kerajaan untuk berkuasa dengan berbagai kepentingan. Kerajaan tertua yang pernah menduduki wilayah Lampung adalah Kedatuan Sriwijaya (Boechari, 2012a, hal. 377). Bukti kehadiran Sriwijaya di Lampung dapat ditelusuri melalui situs permukiman kuno di Way Sekampung (Saptono, 2013, hal. 138). Penguasa Lampung di masa selanjutnya (abad XIII-XIV) besar kemungkinan adalah Majapahit, merujuk pada keterangan *Kakawin Nagarakrtagama canto 13 stanza 2* (Pigeaud, 1960, hal. 16). Lampung pada abad XVI mulai didominasi oleh kekuasaan Kesultanan Banten (Ariwibowo, 2017, hal. 254), disusul Kesultanan Palembang yang kemudian mulai berkuasa di sebagian utara Lampung pada abad XIX (Boechari, 2012c). Bukti kekuasaan Kesultanan Banten dan Palembang di Lampung adalah berupa prasasti logam yang dikeluarkan oleh kedua kesultanan tersebut. Prasasti logam ini di Palembang lebih dikenal dengan sebutan "*piyagëm*" (Fadhilah & Tarawiguna, 2019, hal. 210), sedangkan di Banten lebih dikenal sebagai "*dalung*" (Sarjiyanto, 2008, hal. 62).

Temuan prasasti sebagai penanda kekuasaan Kesultanan Palembang dan Banten atas wilayah Lampung pernah disinggung oleh beberapa peneliti sebelumnya. *Piyagëm* Kesultanan Palembang pertama kali dibahas oleh J.L.A. Brandes (1888) dan L.C. Westenek (1919), yang sama-sama berfokus pada inventarisasi dari temuan *piyagëm* dari Sumatera Selatan. Louis-Charles Damais (1995) dalam penelitiannya melakukan analisis kritis terhadap beberapa *piyagëm* Palembang. Machi Suhadi (1998) dalam pembahasannya mengenai *piyagëm*, telah mengoreksi transliterasi dari peneliti-peneliti sebelumnya, sedangkan penelitian R.N. Fadhilah dan I.G.N. Tarawiguna (2019) lebih berfokus pada kajian epigrafis beberapa *piyagëm* Palembang di Sumatera Selatan dengan tujuan pola-pola uraian *piyagëm*. Boechari (2012c) dalam riwayat penelitian *piyagëm* merupakan satu-satunya yang menyingung soal *piyagëm* Palembang yang ditemukan di daerah Lampung.

Penelitian yang berkenaan dengan *dalung* pertama kali diinisiasi oleh H.C. van der Tuuk (1884) yang menginventaris temuan *dalung*. Penelitian tersebut kemudian dilanjutkan G.A.J. Hazeu (1906). Kajian epigrafi juga dilakukan oleh Louis-Charles Damais (1995) pada 12 *dalung* dari Lampung. Husein Djajadiningrat (1920) mulai menggunakan *dalung* sebagai data sejarah. Heriyanti Ongkodharma Untoro (1998), Sarjiyanto (2008), dan Iim Imadudin (2016) menggunakan *dalung* sebagai sumber penelusuran sejarah perdagangan lada. Mufliha Wijayati (2011) di sisi lain melakukan kajian epigrafis terhadap salah satu *dalung*, yaitu *dalung* Bojong.

Sebagai bentuk pembaharuan dalam kajian atas *dalung* dan *piyagëm*, kajian ini bertujuan mengkaji relasi kuasa Sultan Palembang (Sultan Mahmud Badaruddin II) dan Sultan Banten (Sultan Abu Al-Mahasin) di wilayah Lampung berdasarkan *piyagëm* Natayuda dan *dalung* Bojong. Dasar pemikiran dalam telaah ini adalah pendapat Boechari (2012b, p. 25) yang menyebut bahwa prasasti menyajikan beragam narasi politik, struktur birokrasi, atau kebijakan hukum. Asumsi tersebut dikombinasikan dengan pendapat Noerhadi Magetsari (2016) yang menyebut bahwa narasi prasasti sifatnya statis, sehingga perlu ditafsir ulang oleh ahli epigrafi. Masalah dalam penelitian ini dengan demikian:

bagaimana bentuk pesan-pesan politis Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Abu Al-Mahasin dengan kaitannya terhadap pendekatan yang dilakukan kedua kesultanan tersebut pada masyarakat Lampung?

Teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah teori Politik Kekuasaan. J.S. Nye (2009, pp. 268–270) menyebutkan bahwa kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *hard power* dan *soft power*. *Hard power* adalah kekuasaan yang ditandai dengan intervensi militer yang represif, sanksi-sanksi ekonomi, dan diplomasi yang diwarnai dengan kekerasan. *Soft power* adalah kekuasaan yang ditandai dengan himbuan yang persuasif. Tanda dari *soft power* dapat dilihat dari adanya unsur pendekatan politik secara kebudayaan, sosial, religi dan lain sebagainya.

METODE

Penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah di atas terdiri beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, analisis dan interpretasi atau penafsiran (Gibbon, 2013). Proses pengumpulan data meliputi studi kepustakaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang menyinggung alih aksara serta alih bahasa dari sumber tertulis yang digunakan sebagai data penelitian. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *piyagēm* Natayuda (1804 M) dan *dalung* Bojong (1692 M). Data pendukung yang digunakan adalah sumber tertulis berupa prasasti dan naskah yang sezaman dengan masing-masing prasasti yang dijadikan data primer. *Piyagēm* Natayuda dipilih karena merupakan satu-satunya data prasasti dari Kesultanan Palembang (khususnya dari masa Sultan Mahmud Badaruddin II) di daerah Lampung yang tersedia dan telah dikaji secara epigrafis (Boechari, 2012c), sedangkan *dalung* Bojong dipilih karena merupakan data prasasti paling awal dari masa pemerintahan Sultan Abu Al-Mahasin yang diketahui paling banyak mengeluarkan *dalung* di Lampung. Kedua data tersebut walaupun terpaut masa yang jauh, namun dalam penelitian ini dipandang memiliki kesatuan konteks gejala yang sama, yaitu bentuk penetrasi-penetrasi awal penguasa asing di Lampung masa Islam.

Berkenaan dengan kredibilitas *dalung* Bojong sebagai sumber sejarah, *dalung* Bojong dalam penelitian sebelumnya pernah disebut oleh Djajadiningrat (1920) walaupun ternyata uraiannya sebenarnya lebih mengacu pada *dalung* Kuripan. *Dalung* Bojong juga memiliki banyak kesamaan dengan *dalung* Putih yang dikeluarkan di tahun yang sama. Unsur-unsur yang sama dari kedua *dalung* adalah penggunaan media penulisan prasasti tembaga, penggunaan aksara Arab Pegon dan bahasa Jawa-Banten, susunan uraian prasasti, dan penggunaan angka tahun hijriyah. Perbedaan keduanya hanya terletak dari penyebutan nama raja (*dalung* Putih menyebut nama raja, sedangkan Bojong tidak menyebut) dan tempat ditujukannya perintah prasasti dilaksanakan (Pigeaud, 1929, hal. 126–129). *Dalung* Bojong dengan demikian dapat dipastikan sebagai prasasti yang otentik dari masa Sultan Abu Al-Mahasin dari Kesultanan Banten pada awal abad ke-17.

Data hasil studi kepustakaan yang terkumpul kemudian melalui tahapan analisis. Tahapan analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasi unsur-unsur prasasti yang terdiri dari beberapa kebijakan-kebijakan yang muncul dalam prasasti dan penggunaan bahasa serta aksara dari prasasti. Hasil analisis

selanjutnya melalui tahapan interpretasi yang dilakukan dengan mencocokkan hasil analisis dengan historiografi kedua kesultanan. Tahapan interpretasi berupa asumsi atas dasar hasil analisis dari keterkaitan data dengan konteksnya yang menggambarkan bentuk relasi kuasa Kesultanan Palembang dan Kasultanan Banten di wilayah Lampung.-

HASIL PENELITIAN

Piyagēm Palembang di Lampung

Louis-Charles Damais (1995, p. 204) menyebutkan bahwa *piyagēm* Kesultanan Palembang yang telah diinventaris sejak akhir abad XIX berjumlah sekitar 21 prasasti. Jumlah tersebut belum termasuk dengan temuan *piyagēm* Natayuda dari Lampung yang baru dialihaksarakan oleh Boechari tahun 1986 dan *piyagēm* Rejang Lebong di Bengkulu yang pertama kali dibaca oleh Tjahjono Prasodjo pada tahun 1998 (Boechari, 2012c; Fadhilah & Ngurah Tara Wiguna, 2019). *Piyagēm* Kesultanan Palembang yang sudah diketahui umumnya tersebar di Provinsi Sumatera Selatan dan sebagian di daerah Bengkulu, Lampung serta Bangka-Belitung (Boechari, 2012c; Damais, 1995; Suhadi, 1998). Beberapa temuan *piyagēm* Kesultanan Palembang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebagian *Piyagēm* Kasultanan Palembang dari abad XVII–XIX

No.	Nama <i>Piyagēm</i>	Angka Tahun	Pihak/Desa penerima perintah	Aksara dan Bahasa	Ikhtisar Isi
1.	<i>Piagam No. 10 (Sungi Keruh)</i>	1686 J/ 1760 M	Desa Sungi Keruh	Aksara Jawa Baru Bahasa Jawa-Palembang	Aturan penanaman <i>sahang</i> (lada), larangan untuk berbuat onar, dan perkawinan
2.	<i>Sukabumi (Tanjung)</i>	1690 J/ 1765 M	Desa Tanjung	Aksara Jawa Baru Bahasa Jawa-Palembang	Aturan penanaman <i>sahang</i> (lada), larangan untuk berbuat onar, dan aturan untuk orang peranakan
3.	<i>Piagam No. 6 (Pangeran Pakubuwana)</i>	1690 J/ 1765 M	Pangeran Pakubuwana	Aksara Jawa Baru Bahasa Jawa-Palembang	Aturan perpindahan rumah, hutang-piutang, dan berbuat onar
4.	<i>Piagam No. 7 (Palimbangan)</i>	1690 J/ 1765 M	Desa Palimbangan	Aksara Jawa Baru Bahasa Jawa-Palembang	Aturan tanam <i>sahang</i> (lada) dan larangan berbuat onar
5.	<i>Piagam No. 8 (Patani)</i>	1702 J/ 1777 M	Desa Patani	Aksara Jawa Baru Bahasa Jawa-Palembang	Aturan pelarangan perjudian dan hutang piutang
6.	<i>Piagam No. 11 (Pangeran Natagama)</i>	1702 J/ 1777 M	Pangeran Natagama	Aksara Jawa Baru Bahasa Jawa-Palembang	Aturan hutang piutang, berbuat onar dan membunuh
7.	<i>Piagam Way Batanding (Pangeran Natayuda)</i>	1729 J/ 1807 M	Desa Way Batanding (kemungkinan sekarang masuk daerah Lampung Barat, Provinsi Lampung)	Aksara Jawa Baru Bahasa Jawa-Palembang	Aturan hutang piutang, larangan berbuat onar, dan berpindah tempat

Sumber: (Boechari, 2012c; Damais, 1995; Suhadi, 1998)

Temuan *piyagēm* Kesultanan Palembang di Lampung sampai sekarang hanya ditemukan di tepian selatan Danau Ranau, Way Tanding, Pagardewa, Lampung Barat. Berikut merupakan alih aksara dan alih bahasa dari *piyagēm* tersebut,

“hinjaŋ layaŋ piyagēm kanjĕŋ sulthan ratu. Kaga duhhakĕn mariŋ paŋeran natayuda desa way batandiŋ. Margganiŋ sinuŋan layaŋ piyagĕ= m. deniŋ haŋdawuħhakĕn taliti dalĕm. Kaŋ lumrah hiŋ paĊesan kabeh utawi lamun nana woŋ palembaŋ hutari hapihutaŋ lan woŋ desa mu = wah papadaniŋ desa. Yen tumĕkka hiŋ ubayane hora nahur maŋka hinituŋ katigaŋ wĕllasan. Tutuk piŋ tiga muŋgah dadi nikĕl hora kni muŋgah maniŋ. muwah yen woŋ hutang hapiyutaŋ hora pisahil hiŋ prawatine ya hiku dadi pĕtĕŋ. Lan hora kna tarik tinarik. Huwati dagaŋ hapiyutaŋ mariŋ woŋ desa. Lamun duruŋ tutas tiban dalĕm ho= ra kna hanagiħ kalawan prakara hutari karena juĊi sabuŋ hora kna tinagiħ lan hora kna tukarbantaħ paten pinaten deniŋ prawatin paĊa mupakat kabeh, muwah hora kna woŋ dagaŋ atawa woŋ desa hulaha dagaŋ huwoŋ hiku laraŋan dalĕm. Lan hora kna woŋ dagaŋ moŋĊok hiŋ numah woŋ desa hatawa haŋgawih humah yen maksa huga kna danĊa dalĕm. Utawi lamun nana woŋ maliŋ maŋka wus ŋata pamaliŋe saduwine woŋ niku mulih nikĕl kaŋ maliŋ iku dadi panambut gawih. Utawi kaŋ wĕnnaŋ dadi hantĕrranniŋ kupotusanniŋ ratu. Lan jĕjĕnĕnan lamun dudu kaŋ kaya hiku poma haja hiŋantĕr. Yen maksa huga prawatin gawaha malembaŋ. Kalawan lamun nana woŋ nĕmu gaĊiŋ samambu kaŋ bĕcik lan komala, lan cula, lan gulila, tanċaluŋ candramawa Ċĕlup lan pintĕl, ya hiku kadalĕm. Utawi lamun nana woŋ kanak-kanak tu= li, buras, wuŋkuk, wujil, palikaŋ, lan cebol, lan kĕmbar, kaŋ kaŋ ya hiku tĕmonniŋ ratu. doŋnya hamrdowa tan dadi. Mandiya saħuni= niŋ layaŋ piyagēm. Iŋ ŋaka larwaŋannya. Trus waspaĊa swaniŋ ratu. Ha (ŋ) kaŋnya 1729 titi.”

“Inilah surat *piyagēm* dari Sultan Ratu, diberikan kepada Pangeran Natayuda dari Desa Way Batanding. Sebabnya ia diberi surat *piyagēm* karena ia harus menyebarkan perintah raja yang meluas ke seluruh pedesaan. Jika ada orang Palembang berhutang piutang dengan orang desa atau sesama desa, jika sampai kepada perjanjiannya ia tidak membayar maka hutangnya dihitung menjadi “ketigabelasan” (ditambah bunga 10%). Sampai mundur tiga kali naik menjadi dua kali lipat. Tidak boleh naik lagi. Dan jika seseorang hutang piutang tanpa memberitahu kepada *perwatin*, maka hutang itu menjadi gelap (bukan tanggung jawab *perwatin*). Dan tidak boleh tarik menarik. Atau jika pedagang berpiutang, dengan orang desa, jika belum tuntas menjadi urusan raja. Tidak boleh menagih hutang yang disebabkan karena judi sabung, tidak boleh ditagih dan tidak boleh bertengkar, bunuh membunuh. Semuanya disepakati bersama *perwatin*. Dan tidak boleh pedagang atau orang desa menjual orang, itu larangan Sultan. Dan tidak boleh pedagang bermalam/tinggal bersama di rumah orang desa atau membuat rumah. Jika memaksa juga dikenai denda oleh Sultan. Atau jika ada orang mencuri dan sudah jelas apa yang dicurinya, maka milik orang yang dicuri itu kembali lipat dua, dan orang yang mencuri dikenai hukuman kerja paksa. Atau yang boleh menjadi antaran urusan Sultan dan *jejenengan*. Jika tidak seperti itu

hendaknya jangan diantar. Jika memaksa juga hendaknya *perwatin* yang membawanya ke Palembang. Dan jika ada orang yang menemukan gading, yang kiranya baik, dan kemala, dan cula, dan 'gulila'. 'tanggapung', kucing Candramawa, 'celup' dan 'pintel', itu semuanya menjadi milik Sultan. Atau jika ada orang beranak tuli, *burik* (luka bekas cacar atau penyakit kulit lain), bongkok, kerdil, 'palikang', dan cebol, dan kembar, semuanya menjadi temuan (abdi) Sultan. Hendaknya lebih 'mandi' (?) semua yang tersurat di dalam surat *piyagēm*. Pada tahun Saka yang lamanya "trus waspada swaniṅ ratu" (nama *candrasengkala*), angkanya 1729 (1807 M), titi." ([Boechari, 2012c](#), hal. 524-526)

Piyagēm Natayuda secara umum memang tidak menyebutkan secara langsung raja yang mengeluarkan prasasti tersebut. Unsur-unsur yang menandakan bahwa *piyagēm* ini dikeluarkan oleh Sultan Palembang, justru terlihat dari penyebutan nama tempat serta nama jabatan-jabatan tertentu. Kalimat "...Yen maksa huga prawatin gawaha malemban..." (apabila memaksa, maka *prawatin* akan membawa ke Palembang) memperlihatkan pihak yang mengeluarkan *piyagēm* ini sebagai penguasa yang berkuasa di Palembang. Jabatan *prawatin* juga merupakan jabatan yang khas dari sistem birokrasi Kesultanan Palembang. Jabatan ini secara hierarki berada di bawah *depati* (adipati) dan bertugas langsung membawahi *matagawe* (rakyat). Jabatan *prawatin* singkatnya mirip dengan jabatan kepala desa di masa modern ([Wargadalem, 2017](#), hlm. 13). Keunikan lain dari *piyagēm* Natayuda adalah ketiadaan perintah untuk menanam lada bagi masyarakat Way Batanding, sehingga berbeda dengan *piyagēm* Kesultanan Palembang pada umumnya.

Dalung Banten di Lampung

Dalung Banten yang sampai sekarang telah diinventaris jumlahnya tidak sebanyak *piyagēm* Palembang. Paling tidak terdapat 12 *dalung* Banten yang telah diinventaris. Seluruh temuan *dalung* tersebut isinya berkaitan dengan wilayah Lampung. *Dalung-dalung* Kesultanan Banten tersebar di hampir seluruh wilayah Banten, mulai dari Teluk Betung di selatan, Kotabumi di utara, aliran Sungai Way Sekampung di timur dan Krui di Pantai Barat Lampung ([Damais, 1995](#)). Berikut merupakan sebagian *dalung* Banten di Lampung ([tabel 2](#)),

Dalung dari Desa Bojong merupakan *dalung* paling awal yang dikeluarkan oleh Sultan Banten terhadap masyarakat Lampung yang secara spesifik hanya mencakup suatu daerah (dalam hal ini wilayah Sekampung). Berikut merupakan hasil dari alih aksara dan bahasa dari *Dalung* Bojong,

"Lan mâning lâmuṅ ana kongkonan Kang Jeng Sulthân ing Lampung utawa liyâné ikû sakabéhing punggâwa dén padha mûfaqata atûhun (?) pangandhûkan dâlem dén timbalâken déning kongkonan iki sarta padha rûmekсахâ ing sakabéhé kekûrângané. Lan mâning singsâpa tetûkâran utawa peperangan padha ra'yat Kang Jeng Sulthân ikû kâdhendha karoné lâmuṅ mâti sâlâh sawîji saking karoné maka kang ûrip pinâtén hukomé sarta anaq râbiné angâlêhâken mâring Sûrasowân dâdi 'abdî dâlem lan sakabéhé artâné rinampas kâtur ingdâlem. Lan mâning singsâpa punggâwa ingdâlem negârané dhéwék utawa punggâwa kang liyân-liyân agawé perang pada ra'yat Kang Jeng Sulthân sebab kârepé dhéwék

ora kalawan pâréntâh lan idzin Kang Jeng Sulthan ikû ora kuwâsa ora anyandang bebendo lan hukum kang luwih sângêt saking Kang Jeng Sulthân kârana penggâwéné iki apahukomâken wong dûrâka lan bagha Inggang Jeng Sulthân. Kâya mongkono mâning singsâpa longa angrâmpog utawa angéwât ing lâhût utawa ing dhârat ora kalawan pâréntâh Kang Jeng Sulthân ikû hukomé pinâten sarta anaq râbiné angâlêhaken mâring Sûrasowân dâdi 'abdî dâlem lan sakabéhé duwéné kâtur ingdâlem. Lan singsâpa kepondhokan wong [?saking] angrâmpog utawa angiwat mrâna mréné ingdâlem negârané utawa ing muwâra kâlîné nânging ora kuwâsa ora pûnggâwa iki angrûsak kalawan sakuwâsané ingatasé wong kang dûrâka iki. Lan mâning lâmûn ana wong lampung arep alelûngan kalawan prahû becik momot becik ora ikû anjâllok sûrat cap prahû ing pûnggâwané pitakoning sûrat cap lan ajâ pîsan2 apé mrâna mréné ikû arep anjojug ing Sûrasowân sahinggâ yén ana pakéwuh kang gedhé kaya mongkono mâning sakabéhing prahû kang mot saking Sûrasowân iki ajâ pîsan2 ape angliwâti sâwîting sûrat kang dén gâwa iki lan singsâpa angliwâti pangandîkan dâlem iki kâdhendha rinampas prahûné sarta momotâné. Lan mâning lâmûn pûnggâwa lampung anggâwa mârîca mâring Sûrasowân utawa kongkonâné iki angatûrân sûrat Inggang Jeng Sulthân kabêhing mârîca kang dén gâwa iki lan kâya mongkono mâning sakabéhing wong cîli2 kang anggâwa mârîca mâring Sûrasowân iki padha awehâ warta mâring pûnggâwâné pîra mârîca kang dén gâwa iki maka pûnggâwâné angatûrân sûrat Inggang Jeng Sulthân. Lan mâning lâmûn ana kâpal utawa slaven Kumpenî utawa sapadhâné iki prahû ra'yat Jayâkartâ kelembaging pesisîr Lampung sebab kilîr kagâwa dhéning angin gedhé utawa kasûkarân kang liyân liyân maka pûnggâwa kang ana ingdâlem negâra iki pacuwan orâ atolung lan pacuwan orâ rûmeksa ing bârang papanganâné utawa liyâné dén kaya ra'yat Kang Jeng Sulthân dhéwék tetepa pûnggâwa kang ana ingdâlem negâra iki anjâllok tetûlisan mârang kaptên kâpal iki maka atorna ing Kang Jeng Sulthân iki supâya olêh wewâles kebecîkané. Lan mâning lâmûn ana wong adhagâng wong pûtih anâné utawa wong irengan anâné wongiku pecah prahûné ing pesisér Lampu \ng maka pûnggâwa ingdhâlem negâra iki prayoga atolung kalawan sâtutoké lan pacuwan îlang artâné yen ora pahâdhom [tigel/tikel] sarta panyomeksahâ maka gâwanen wongikû mâring Sûrasowân sarta sakabéhé artâné kâtur Inggang Jeng Sulthân. Lan mâning singsâpa anyolong utawa atotohan barang selobarang(?) atotohan utawa angînum arak utawa barang înumnûman kang amûrbiya iki kâdhendha sarta anghukomaken kalawan pâréntâh Kang Jeng Sulthân. Lan mâning pâréntâh Kang Jeng Sulthân mârang sakabéhing pûnggâwa Sekampung méwah ing sakabéhing wong cîli2 ikû pangandîkâkâken kinon ing wong sawîji atandur mârîca ing lîmangâtus witwaras. Dhâwuh undhang2 dâlem iki ing akhiring wûlan Jumâdil awal tâhun Bâ' séwu sâtus rong tâhon lumâkû saking hijrah an-Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Tamma"

“Dan apabila datang pembawa pesan yang mulia Sultan ke Lampung, baiknya para punggawa saling bersepakat akan perintah Sultan yang disampaikan sang pembawa pesan, agar menjadi keharusan pula adanya agar mereka senantiasa melengkapi yang kurang apabila ada rakyat Sultan yang saling berkelahi, hendaknya diberi hukuman denda. Dan apabila salah satu dari dua orang yang berkelahi itu tewas, salah satu di

antara mereka yang masih hidup akan dihukum mati serta anak-istrinya dijadikan abdi bagi raja di Surosowan lagi kekayaannya akan menjadi hak kesultanan. Apabila ada punggawa di dalam negerinya sendiri (Kesultanan Banten) atau punggawa yang lain-lain (wilayah taklukan Kesultanan Banten) yang memancing keributan atau peperangan di kalangan rakyat yang mulia Sultan dengan tanpa perintah sultan, maka jabatannya akan dicabut, senjatanya diambil dan menerima hukuman seberat-beratnya dari yang mulia Sultan, karena perihal itu masuk ke dalam tindak membelot pada Sultan. Jika ada orang merampok atau [menghadang?] baik di laut atau di darat di luar perintah sultan, hendaknya dihukum mati serta anak-istrinya dijadikan abdi bagi raja di Surosowan lagi kekayaannya akan menjadi hak kesultanan. Apabila ada orang yang menampung perampok atau (?) di dalam wilayah kesultanan atau di muara sungai miliknya, yang orang tersebut bukan pemangku jabatan kesultanan maka wajib menindak orang tersebut. Apabila ada orang Lampung berlayar, baik dengan kapal bermuatan ataupun tidak, baiknya meminta surat cap perahu terlebih dahulu pada pejabat yang memiliki wewenang atas cap perahu, dan dilarang baginya untuk bepergian ke Surosowan supaya terhindari dari masalah besar. Dan sama halnya, agar kapal yang menyampaikan barang ke Surosowan, tidak untuk menyalahi aturan di dalam surat yang ia bawa, dan apabila melanggar maka dihukum penyitaan kapal beserta muatannya. Apabila ada pejabat Lampung atau utusannya yang menyampaikan lada ke Surosowan, diwajibkan untuk memberikan surat keterangan mengenai keseluruhan jumlah lada yang disampaikan. Sama halnya, jika ada rakyat biasa yang menyampaikan lada ke Surosowan, maka diwajibkan untuk memberitahu pejabat setempat mengenai keseluruhan jumlah lada yang disampaikan, agar nantinya dibuat surat pengantar yang ditujukan bagi Sultan oleh pejabat setempat tersebut. Serupa halnya, jika ada kapal atau *slaven* (?) kepunyaan kompeni atau rakyat Jayakarta terdampar di wilayah pesisir Lampung karena terjangan badai atau masalah lain, wajib hukumnya pejabat setempat untuk membantu mereka layaknya warga kesultanan Sultan, tetapi baiknya pejabat setempat itu meminta catatan dari nahkoda kapal yang terdampar itu, untuk nantinya disampaikan kepada sultan supaya mendapatkan balasan akan kebaikan itu. Apabila ada pedagang, baik berkulit putih ataupun hitam, yang kapalnya pecah di wilayah pesisir Lampung, maka wajib diberikan pertolongan hingga selesai, dan jangan sampai hilang harta bendanya. Kalau tidak --, maka sampaikanlah orang tersebut ke Surosowan, yang nantinya seluruh harta bendanya menjadi milik Sultan. Sama halnya, apabila ada orang yang mencuri, berjudi, ---, atau minum minuman keras atau memabukkan, maka dihukum denda sebagaimana instruksi yang mulia Sultan. Serupa pula, bahwasanya perintah Sultan melalui pejabat sekaligus rakyat kecil Lampung, tiap-tiap orang wajib menanam 500 tumbuhan lada. Undang-undang ini ditetapkan pada akhir bulan Jumadil Awal Tahun Be 1102 Hijriyyah (1692 M)" ([Wijayati, 2011](#), hal. 390–398).

Tabel 2. Sebagian *Dalung* Sultan Banten dari abad XVII-XVIII

No.	Nama <i>Dalung</i>	Angka Tahun	Pihak/Desa penerima perintah	Aksara dan Bahasa	Ikhtisar Isi
1.	<i>Kuripan</i>	1073 H/ 1662-1663 M	Untuk seluruh rakyat Lampung	Aksara Jawa Baru Bahasa Jawa Banten	Perintah bagi rakyat Lampung untuk setia pada Sultan Banten
2.	<i>Bojong</i>	1102 H/ 1691-1692 M	Desa Sekampung (kemungkinan sekarang masuk ke daerah Sekampung Udik, Lampung Timur, Provinsi Lampung)	Aksara Arab Pegon Bahasa Jawa Banten	Keterangan bahwa lada dapat digunakan untuk alat pembayaran hutang-piutang, kebijakan yang mengharuskan penanaman lada
3.	<i>Putih</i>	1102 H/ 1691-1692 M	Desa Putih	Aksara Arab Pegon Bahasa Jawa Baru	Keterangan bahwa lada dapat digunakan untuk alat pembayaran hutang-piutang, kebijakan yang mengharuskan penanaman lada
4.	<i>Krui</i>	1102 H/ 1691-1692 M	Desa Krui	Aksara Arab Pegon Bahasa Jawa Banten	Keterangan bahwa lada dapat digunakan untuk alat pembayaran hutang-piutang, kebijakan yang mengharuskan penanaman lada
5.	<i>Sukung</i>	1104 H/ 1692-1693 M	Desa Sukung	Aksara Jawa Baru Bahasa Jawa Banten	Keterangan bahwa lada dapat digunakan untuk alat pembayaran hutang-piutang, kebijakan yang mengharuskan penanaman lada
6.	<i>Tegi Neneng</i>	1185 H/ 1772 M	Desa Tegi Neneng	Aksara Arab Pegon Bahasa Jawa Banten	Keterangan bahwa lada dapat digunakan untuk alat pembayaran hutang-piutang, kebijakan yang mengharuskan penanaman lada

Sumber: (Damais, 1995; Pigeaud, 1929; Sarjiyanto, 2008)

Sejarah Singkat Kesultanan Palembang dan Banten serta Hubungan Diplomatis Keduanya

Kesultanan Palembang awalnya merupakan kesultanan bawahan Demak pada abad ke-16. Pendirian Kesultanan Palembang diperkirakan terjadi karena adanya peristiwa sejarah jauh sejak abad-abad sebelumnya. Berdasarkan catatan Dinasti Ming, sebagaimana yang termaktub dalam *Ying Yai Sheng Lan*, menyebut bahwa *Ku-Kang* (Palembang) pada abad ke-15 merupakan wilayah bawahan Jawa (mungkin sekali Majapahit) yang banyak dihuni oleh orang Tionghoa. Daerah ini berulang kali pula diduduki oleh para perompak, salah satunya yang tersohor adalah Chen Zu Yi (Groeneveldt, 2018, hal. 83)

Ki Gede Ing Suro pada abad ke-16 kemudian datang ke Palembang dan mulai mendirikan kadipaten di sana. Kadipaten tersebut selama paruh akhir

abad ke-16 hingga abad ke-17 menjadi vasal dari kesultanan-kesultanan di Jawa, yaitu secara berturut-turut Demak, Pajang, dan Mataram. Ki Mas Hindi menjadi raja pertama (yang bebas dari pengaruh Jawa) Palembang, sejak melemahnya Mataram dan eratnya hubungan diplomatis Palembang dengan VOC pada 1702. Wilayah Palembang sejak masa Ki Gede Ing Suro meliputi wilayah Komering Ilir dan Ulu, Ogan Ilir dan Ulu, Musi Ilir dan Ulu, Lematang Ilir dan Ulu, Banyuasin, Buai Bawan, Blalau, Ranau, Buai Pemaca, Mekakau, Buai Runjung, Kisam Saka, Semendo, Enim, Mulak Ulu, Kikim, Ulu Manna, Pasumah, Ampat Lawang, Rejang Tengah, Rawas, Lebong dan Bangka Belitung ([Wargadalem, 2017](#), hal. 5).

Serupa dengan Kesultanan Palembang, berdirinya Kesultanan Banten juga tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Kesultanan Demak. Sejak awal kedatangan Islam di Jawa Barat, Banten (Banten Girang) yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda, berangsur-angsur mulai melepaskan diri. Tokoh sentral dalam pembentukan Kesultanan Banten berada di tangan Maulana Hasanuddin. Menurut *Sajarah Banten*, Maulana Hasanuddin menaklukkan Banten Girang tahun 1478 M (sesuai dengan *candrasengkala "brasta gempung warna tunggal"*) ([Poesponegoro & Notosusanto, 2010a](#), hal. 65-67)

Kesultanan Palembang dan Banten pada dasarnya merupakan dua kesultanan yang bertetangga. Kontak langsung kedua kesultanan terjadi dalam bentuk perang. Palembang pada masa pemerintahan Pangeran Madi Angsoka (1594-1627) pernah diserang oleh Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Muhammad (1580-1596). Konflik tersebut mengakibatkan wafatnya Sultan Maulana Muhammad (sehingga di kemudian hari digelar *Panembahan Seda ing Rana*) dan kalahnya pasukan Banten. Adapun latar belakang dari penyerangan ini diduga kuat muncul karena persaingan politik dan ekonomi antara Palembang dan Banten atas wilayah Selat Sunda ([Poesponegoro & Notosusanto, 2010b](#), hal. 67; [Syawaluddin & Fikri, 2019](#), hal. 99). Pendapat lain juga menyebutkan bahwa alasan penyerangan Banten ke Palembang juga karena kedekatan Palembang dengan Mataram yang mulai memperluas wilayahnya di Tatar Sunda ([Nawiyanto & Endrayadi, 2016](#), hal. 66).

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan pada *piyagëm* dan *dalung* yang ditemukan di Lampung, terdapat beberapa unsur yang menonjol. *Piyagëm* Palembang umumnya ditulis dalam aksara Jawa Baru, sedangkan secara kebahasaan *piyagëm* Palembang menggunakan bahasa Jawa-Palembang. *Dalung* Banten dari unsur aksara yang digunakan lebih bervariasi, sebagian ditulis dalam aksara Arab Pegon dan sebagian lain beraksara Jawa Baru. Bahasa yang digunakan pada *dalung* umumnya menggunakan bahasa Jawa-Banten. Unsur internal atau isi dari *piyagëm* dan *dalung*, dengan demikian memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan karakteristik.

Penanggalan yang digunakan dalam *piyagëm* dan *dalung* memiliki perbedaan yang mendasar. *Piyagëm* dalam penanggalannya lebih sering menggunakan penanggalan Islam-Jawa, yang dikembangkan oleh Sultan Agung ([Musonnif, 2017](#), hal 347-348). *Dalung* Banten, di sisi lain, menggunakan penanggalan Hijriyyah yang memang menjadi tradisi dalam dunia Islam. Berdasarkan angka tahun yang terlampir pada *piyagëm* Natayuda, kuat dugaan

dikeluarkan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II yang naik takhta pada tahun 1803 M ([Wargadalem, 2017](#), hal. 32). *Dalung* Bojong apabila dilihat angka tahun yang tertera pada prasasti tersebut, kemungkinan dikeluarkan oleh Sultan Abu al-Mahasin Muhammad Zainulabidin (1690-1773) ([Damais, 1995](#), hal. 202).

Narasi yang menyinggung kehidupan politik-birokrasi menjadi salah satu aspek yang seringkali muncul dalam prasasti. Narasi politik dan birokrasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah penyebutan beberapa jabatan publik serta pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan politik kesultanan yang mengeluarkan prasasti tersebut. Penyebutan jabatan kesultanan yang sama-sama disebutkan dalam *piyagēm* maupun *dalung* adalah "Sultan". Jabatan tersebut tentu menjadi sentral karena berkaitan dengan pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan prasasti sekaligus sebagai otoritas tertinggi dalam birokrasi politik kesultanan. Berkenaan dengan deskripsi isi kedua prasasti yang telah dilakukan, dalam *piyagēm* Natayuda Sultan Palembang hanya disebut sebagai "*Sulthan Ratu*", demikian pula pada *dalung* Bojong, nama sang sultan tidak disebut sama sekali (hanya disebut "*Kanjeng Sultan*").

Identifikasi tokoh "sultan" pada *piyagēm* Natayuda, sebelumnya pernah dibahas oleh Boechari. Merujuk kepada pendapat Boechari ([2012c](#), p. 524), *piyagēm* Natayuda mungkin sekali merupakan prasasti *tinulad* dari prasasti asli masa Sultan Agung. Akan tetapi, Boechari tidak menyebut dengan jelas kaitan prasasti ini dengan Sultan Agung serta Sultan Agung dari kesultanan manakah yang dimaksud. Penulis justru berpandangan bahwa dari gelar "*Sulthan Ratu*" pada *piyagēm* Natayuda mewakili nama Sultan Mahmud Badaruddin II. Pendapat tersebut didasarkan dari keterangan sejarah yang menyebutkan bahwa Sultan Mahmud Badaruddin II, memang bergelar "Pangeran Ratu" baik ketika masih menjadi pangeran mahkota maupun ketika sudah menjadi sultan. Sultan Mahmud Badaruddin II juga pada dasarnya bertakhta pada awal abad ke-19 atau dalam hal ini sezaman dengan *piyagēm* Natayuda ([Wargadalem, 2017](#), hal. 32). L.Ch. Damais ([1995](#), p. 202), di sisi lain, mengidentifikasi tokoh "*Kanjeng Sulthan*" dalam *dalung* Bojong sebagai Sultan Abu al-Mahasin Muhammad Zainulabidin, merujuk pada angka tahun prasasti yang termasuk ke periode pemerintahan raja tersebut.

Jabatan lain yang disebut dalam *piyagēm* Natayuda adalah *jejenengan* dan *perwatin*. *Jejenengan* oleh H.C. van der Tuuk ([1884](#)), seorang filolog Belanda, disamakan dengan tuan tanah yang sekaligus menjabat sebagai "adipati". Jabatan tersebut uniknya juga dikenal dalam struktur birokrasi di Banten. *Perwatin* dalam hal ini menduduki posisi di bawah posisi *jejenengan*. Berbeda dengan *piyagēm* Natayuda, *dalung* Bojong tidak menyebut sama sekali nama-nama jabatan dalam sistem birokrasi kesultanan. Nama pejabat hanya disebut sebagai "punggawa kesultanan".

Piyagēm Natayuda menyediakan informasi lebih minim dibandingkan dengan *dalung* Bojong dalam hal kebijakan politik. Berlawanan dengan *piyagēm* Natayuda, secara rinci *Dalung* Bojong menyebutkan beberapa kebijakan publik yang sifatnya politis, misalnya anjuran untuk bermufakat di kalangan para punggawa, larangan untuk memberontak pada kesultanan, aturan dalam berdiplomasi dengan kompeni dan lain sebagainya. *Piyagēm* Natayuda dalam hal

ini tidak menyebutkan sama sekali anjuran atau narasi semacam itu.

Kesamaan mendasar dari *piyagĕm* dan *dalung* adalah adanya narasi mengenai peraturan perekonomian. Narasi peraturan ekonomi pada *piyagĕm* Natayuda terlihat dari peraturan hutang piutang antar warga maupun antara warga dengan pedagang. *Dalung* Bojong juga menunjukkan narasi peraturan ekonomi, tetapi mencakup lebih banyak aspek. Peraturan ekonomi yang ditunjukkan meliputi otoritas pelabuhan, perdagangan, dan produksi komoditas lada. Peraturan perekonomian pada kedua prasasti dilengkapi pula dengan sanksi-sanksi yang memberatkan pelanggar dari peraturan tersebut.

Perbedaan mendasar antara *piyagĕm* Natayuda dan *dalung* Bojong, terletak dari eksistensi narasi yang menyinggung soal norma. *Dalung* Bojong lebih banyak menguraikan norma yang berkenaan dengan ajaran Islam (seperti larangan membunuh, merampok, berjudi, dan bermabuk-mabukan) dibandingkan dengan *piyagĕm* Natayuda. Orang yang melanggar aturan tersebut akan dihukum oleh sultan secara langsung di ibukota (Surosowan). Narasi yang menyinggung norma di *Dalung* Bojong, juga tercermin dari adanya anjuran untuk berbuat baik.

Piyagĕm Natayuda dan Sultan Mahmud Badaruddin II

Analisis sebelumnya menunjukkan terdapat beberapa gejala yang muncul pada *piyagĕm* Natayuda. Pertama, dari penggunaan bahasa dan aksara yang digunakan, Kesultanan Palembang agaknya masih melanjutkan tradisi penulisan yang berakar dari kebudayaan Jawa. Tradisi penulisan yang dimaksud adalah penggunaan penanggalan Jawa. Kedua, dari segi uraian prasasti, pihak yang mengeluarkan prasasti terlihat seakan-akan hanya berorientasi pada pengendalian wilayah secara politis dan ekonomis. Kedua gejala ini bisa terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal Kesultanan Palembang.

Kesultanan Palembang khususnya dalam kehidupan berpolitik, memiliki pandangan *uluan* dan *iliran*. Istilah tersebut mengacu pada dualitas masyarakat Sumatera Selatan, yaitu masyarakat yang menduduki wilayah hilir sungai (*iliran*) dan masyarakat yang tinggal lebih ke hulu sungai (*uluan*). Kedua masyarakat ini secara sosial memiliki ketimpangan dalam cara memandang kebudayaan satu sama lain. Orang *iliran* memandang peradabannya lebih maju dan beradab dibandingkan dengan orang *uluan*, sehingga ada semacam kebanggaan di kalangan orang *iliran* terhadap orang *uluan* (Santun dkk., 2010). Gejala dalam aksara, bahasa dan penanggalan *piyagĕm* Natayuda agaknya perlu dipandang dalam paradigma ini. Sultan Palembang yang merupakan orang *iliran* (berkebudayaan Jawa), menunjukkan kebanggannya melalui cara penulisan prasasti yang sedemikian rupa.

Kesultanan Palembang dari segi eksternal juga sering mendapat tekanan politik dari pihak kolonial, yang berdampak pada pembuatan keputusan kerajaan. Sultan Mahmud Badaruddin II berkuasa di masa kejatuhan VOC, sehingga posisi tawarnya dalam berdiplomasi menjadi menguat. Masa kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin II juga menjadi masa keemasan Kesultanan Palembang karena stabilnya ekonomi kesultanan. Kestabilan ekonomi tersebut bersumber dari adanya perdagangan bebas antara Palembang,

Inggris dan Tiongkok. Fenomena ini secara tidak langsung memperkuat kekuatan militer Palembang, khususnya wilayah pedalaman (Wargadalem, 2017, hal. 32-33). Penaklukan terhadap sebagian wilayah Lampung ini dapat dikatakan sebagai salah satu cara Sultan Mahmud Badaruddin II dalam memperkuat wilayah pedalaman di masa awal pemerintahannya. Pola politik dan ekonomis pada prasasti menjadi masuk akal dalam tataran ini, karena memang pendudukan Palembang atas sebagian daerah Lampung didasarkan pada motif politik dan ekonomi. Kepentingan politik ini diperkirakan juga terpengaruh adanya konflik antara Palembang dan Banten di tahun 1596 M (gambar 1).



Gambar 1. Batas-batas wilayah kekuasaan Kesultanan Banten yang lebih mendominasi dibandingkan wilayah Kesultanan Palembang di Lampung berdasarkan temuan prasasti. Keterangan : warna kuning terang mewakili wilayah Kesultanan Banten di Lampung, warna krem mewakili wilayah inti Kesultanan Banten, warna merah terang mewakili wilayah Kesultanan Palembang di Lampung, warna merah gelap mewakili wilayah inti Kesultanan Palembang, dan warna putih mewakili wilayah Bengkulu (Sumber: Alnoza, 2021)

Dalung Bojong dan Sultan Abu Al-Mahasin

Dalung Kesultanan Banten, khususnya *dalung* Bojong, menunjukkan gejala yang terlihat lebih kompleks dibandingkan dengan *piyagēm* Kesultanan Palembang. Gejala itu antara lain dapat terlihat dari penggunaan aksara Arab Pegon dan penanggalan Hijriah pada prasasti, adanya narasi politik dan ekonomi, serta adanya narasi yang berkaitan dengan norma keagamaan. Gejala-

gejala tersebut dapat ditafsirkan mengandung dua faktor utama, yaitu faktor kepentingan politik-ekonomi kesultanan dan faktor supremasi keagamaan kesultanan.

Aspek politik-ekonomi kesultanan didasarkan pada sejarah orientasi pendirian Kesultanan Banten oleh Maulana Hasanuddin dan Sunan Gunung Jati. Sejak pendiriannya, atas anjuran Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin memindahkan ibukota kesultanan dari Banten Girang ke Surosowan yang berada di pesisir. Pemandahan tersebut bisa ditafsirkan sebagai upaya Kesultanan Banten dalam menjadikan diri sebagai pusat perdagangan internasional di ujung barat Pulau Jawa. Berdasarkan data-data arkeologis dan data sejarah, daerah Surosowan dan pelabuhan Karangantu memang daerah pelabuhan yang ramai akan pedagang dari berbagai bangsa. Ramainya pelabuhan ini tentu akan menjadi lebih menguntungkan apabila kesultanan mampu menyediakan komoditas yang laku di pasaran. Lada dari Lampung dianggap sebagai komoditas yang laku di pasaran, karena kualitasnya mengalahkan jenis-jenis lada dari daerah lain (Wibisono, 2013, hal. 114-117). Motivasi dagang tersebut dalam kaitannya dengan *dalung* yang dikaji terlihat jelas dari cara penyampaian Sultan Banten. Sultan menjabarkan dengan runtut sistem perdagangan lada di Lampung, dari proses produksi, distribusi dan konsumsi.

Faktor supremasi keagamaan memiliki peran penting pula dalam tataran ini. Maulana Hasanuddin sebagai keturunan langsung seorang ulama, telah menempatkan diri sebagai raja sekaligus ulama. Status ini tercermin dari keberadaan konsep *ratu pandita* yang diampu baik oleh Sultan Cirebon maupun Banten (Sucipto, 2010, hal. 478). Masyarakat Lampung secara tradisional juga menganggap orang-orang Banten sebagai penyebar Agama Islam di Lampung (Wijayati, 2011). Keberadaan konsep ini kemudian tercermin dari unsur-unsur keislaman yang cukup kental pada *dalung* Bojong. Pendekatan supremasi agama terbukti menciptakan kedekatan kultural antara orang Banten dan Lampung. Kedekatan kultural tersebut tercermin dari keberadaan ungkapan, "*Lamun ana musuh Banten, Lampung pangarep Banten tut wuri. Lamun ana musuh Lampung, Banten pangarep Lampung tut wuri.*" (Kalau ada musuh Banten, Lampung yang melawan dan Banten mengikuti. Kalau ada musuh Lampung, Banten yang melawan dan Lampung mengikuti). Kedekatan kultural antara Banten dan Lampung juga terlihat dari keberadaan orang Lampung yang bermigrasi ke Cikoneng (suatu daerah di Banten), dan menyatu secara kultural di sana (Sutrisna, 2014, hal. 23-24).

Komoditas Lada dan Perbedaan Orientasi Kekuasaan Palembang-Banten

Salah satu aspek yang penting dalam pembahasan penelitian ini juga adalah komoditas lada sebagai sumber daya alam utama wilayah Lampung. Pulau Sumatera sebagaimana disebut oleh Farida (2009, p. 13) merupakan penghasil lada. Komoditas tersebut menjadi yang paling laku di pasar dagang internasional, terutama bagi kalangan Eropa. Harga komoditas lada abad XVII mencapai empat *real* per-pikul. Orang-orang Eropa yang singgah di Sumatera

biasanya mendapatkan komoditas lada melalui orang Aceh, Riau, atau Palembang.

Lampung di satu sisi juga merupakan penghasil lada. Melalui data *piyağem* dan *dalung* yang ditemukan di daerah tersebut, dapat diketahui bahwa hanya Kesultanan Banten yang secara langsung mengatur soal penyerahan komoditas lada Lampung untuk Sultan Banten. Gejala ini pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan ekstensifikasi lahan tanaman komoditas oleh Kesultanan Banten. Banten yang pada dasarnya produsen lada, mulai memperluas lahan produksi lada ke Lampung sejak pemindahan ibukota Banten ke Surosowan ([Wibisono, 2013](#), hal. 117–118). Pemindahan ibukota ke pesisir ini menyebabkan pelabuhan semakin ramai, sehingga tidak aneh kalau Banten kemudian membutuhkan komoditas lada dengan jumlah lada yang lebih besar.

Mengenai ketiadaannya bukti bahwa Palembang mengejar untung dari produksi lada di Lampung, dapat dijelaskan melalui data sejarah perekonomian kesultanan ini. Palembang di satu sisi juga merupakan distributor lada, namun di sisi yang lain komoditas ini dapat mudah diakses Palembang melalui daerah-daerah yang lebih dekat daripada Lampung. Sebagaimana diketahui bahwa Palembang mendatangkan lada dari wilayah hulu sungai Musi (seperti wilayah Rawas), Bangka dan Belitung ([Farida, 2009](#), hal. 13). Wilayah produksi yang banyak dan jarak yang dekat, memungkinkan Palembang untuk tidak menanamkan kepentingan ekonominya di Lampung yang lebih jauh. Terlebih juga ketika Palembang mulai meluaskan daerahnya ke Lampung, sudah ada Kesultanan Banten yang menjadi pesaing di daerah tersebut.

KESIMPULAN

Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Abu Al-Mahasin tersirat pada gejala-gejala yang muncul pada prasasti yang dikeluarkan oleh kedua sultan. Gejala dalam bentuk narasi-narasi tertentu pada prasasti-prasasti dari dua kesultanan tersebut menunjukkan motif dari upaya penaklukan wilayah Lampung. Motif ekonomi, politik dan religi dapat direpresentasikan dalam bentuk pendekatan yang berbeda dari kedua kesultanan dalam menaklukan masyarakat Lampung. Perbedaan motif penaklukan berdasar dari konteks masa kekuasaan kesultanan, orientasi kekuasaan kesultanan serta konsep-konsep politik yang berlaku dari masing-masing kesultanan. Batas cakupan wilayah Kesultanan Palembang dan Banten di Lampung berdasarkan temuan prasastinya pada akhirnya dapat direkonstruksi.

Sultan Mahmud Badaruddin II sebagaimana yang terlihat dari *piyağem* Natayuda lebih mengedepankan pendekatan dengan pola *hard power*. Pola *hard power* terlihat dari adanya sanksi-sanksi yang bersifat represif berupa ancaman pada aturan perekonomian kesultanan serta adanya upaya pematuhan rakyat kepada pejabat birokratis kesultanan. Mengenai alasan diberlakukannya pendekatan itu dapat dihubungkan dengan orientasi politik Sultan Mahmud Badaruddin II yang menaklukan Lampung dengan tujuan supremasi dan pertahanan negara dari kemungkinan serangan para musuh (Hindia-Belanda dan Banten). Sultan Abu Al-Mahasin di sisi lain menunjukkan pendekatan gabungan antara *hard* dan *soft power*. *Hard power* terlihat dari serangkaian invasi militer Banten ke Lampung. Pola *soft power* direpresentasikan dalam bentuk

anjuran bagi masyarakat Lampung untuk senantiasa berbuat baik serta ancaman-ancaman bagi orang yang melanggar peraturan hukum Sultan Banten. Kebijakan yang demikian tentu berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik dan keagamaan Kesultanan Banten. Sultan Banten yang bertindak sebagai *khalifah* perlu menunjukkan *soft power* sebagai bagian dari upaya penyebaran Islam di Lampung, sedangkan *hard power* dimunculkan sebagai upaya menjaga stabilitas produksi lada di Lampung yang dibutuhkan Banten sebagai pelabuhan dagang.

Data primer (prasasti) yang dibuat pada masa yang berbeda dikaji secara kritis dalam rangka memahami relasi kuasa atas daerah Lampung oleh penguasa dari luar Lampung sesuai dengan konteks zamannya. Perbedaan gejala yang muncul pada uraian prasasti-prasasti yang digunakan sebagai data dengan demikian terikat dengan pengalaman sejarah yang dialami masing-masing kesultanan. Berdasarkan kedua prasasti yang dikaji dalam penelitian ini pula dapat dipahami bahwa dari abad XVII hingga abad XIX, daerah Lampung dianggap sebagai daerah ideal oleh para penguasa kesultanan di sekitar Lampung.

PERNYATAAN PENULIS

Penulis adalah kontributor utama. Artikel ini telah dibaca dan disetujui oleh penulis. Penulis tidak mendapat pendanaan untuk penyusunan artikel ini. Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan yang terkait dengan artikel ini, dan tidak ada pendanaan yang mempengaruhi isi dan substansi dari artikel ini. Penulis mematuhi aturan Hak Cipta yang ditetapkan oleh Berkala Arkeologi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Retno Purwanti dan Aryandini Novita dari Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menulis artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnoza, M., Ananta, R. A. B., & Ramadhanti, M. P. (2020). Ekologi politik dalam perluasan wilayah masa Sriwijaya: Berdasarkan beberapa bukti prasasti. *Berkala Arkeologi Sangkhakala*, 23(1), 58–72.
<https://doi.org/10.24832/bas.v23i1.368>
- Ariwibowo, G. A. (2017). Sungai Tulang Bawang dalam perdagangan lada di Lampung pada periode 1684 hingga 1914. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 19(2), 253–268. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.442>
- Boechari. (2012a). An old Malay inscription of Sriwijaya at Palas Pasemah (South Lampung). In *Melacak Sejarah Kuno Indonesia lewat Prasasti* (pp. 361–382). Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO.
- Boechari. (2012b). Epigrafi dan sejarah kuno. In *Melacak Sejarah Kuno Indonesia lewat Prasasti* (pp. 3–28). Departemen Arkeologi FIB UI.
- Boechari. (2012c). Surat piyagem dari Sultan Palembang kepada Pangeran Natayuda dari Desa Way Batanding. In *Melacak Sejarah Kuno Indonesia lewat Prasasti* (pp. 524–525). Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO.
- Brandes, J. L. A. (1888). Piagam Palembang. *Notulen van Den Algemene En Directie-Vergaderingen van Het Bataviaasch Genootschap Voor Kunsten En Wetenschappen*, XXVI, 117–121.
- Damais, L.-C. (1995). Epigrafi Islam di Asia Tenggara. In *Epigrafi dan Sejarah Nusantara: Pilihan Karangan Louis-Charles Damais* (pp. 167–222). EFEO.
- Djajadiningrat, H. (1920). Nog iets omtrent de Lampongsche oorkonde over de oorspronkelijke verhouding tusschen Lampong en Banten. *Notulen van Den Algemene En Directie-Vergaderingen van Het Bataviaasch Genootschap Voor Kunsten En Wetenschappen*, LVIII, 48–51.
- Fadhilah, R. N., & Ngurah Tara Wiguna, I. G. (2019). Kajian epigrafi pada piagam Kesultanan Palembang. *Humanis*, 23(3), 209.
<https://doi.org/10.24843/jh.2019.v23.i03.p07>
- Farida. (2009). Perekonomian Kesultanan Palembang. *Jurnal Sejarah Lontar*, 6(1), 12–20.
- Gibbon, G. (2013). *Critically reading the theory and methods of archaeology: An introductory guide*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Groeneveldt, W. P. (2018). *Nusantara dalam catatan Tionghoa*. Komunitas Bambu.
- Hazeu, G. A. . (1906). Een beschreven koperen plaat uit de Lampongs. *Tijdschrift Voor Indische Taal- Land-En Volkenkunde*, XLVIII, 1–12.
- Imadudin, I. (2016). Perdagangan lada di Lampung. *Patanjala*, 8(3), 349–364.
<https://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v8i3.14>
- Magetsari, N. (2016). Epigrafi = sejarah kuno ? In *Perspektif Arkeologi Masa Kini: dalam Konteks Indonesia* (pp. 74–84). Kompas Media Nusantara.
- Musonnif, A. (2017). Geneologi kalender Islam Jawa menurut Ronggo Warsito: Sebuah komentar atas sejarah kalender dalam Serat Widya Pradhana. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5(2), 329–355.
<https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.2.329-355>
- Nawiyanto, & Endrayadi, E. C. (2016). *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan warisan budayanya*. Tarutama Nusantara.
- Nye, J. S. (2009). *Understanding international conflicts, 7th ed.* Pearson.

- Pigeaud, T. G. (1929). Afkondigingen van Soeltans van Banten voor Lampoeng. *Djawa, IX*, 123–159.
- Pigeaud, T. G. (1960). *The Nāgarakṛtāgama by Rakawi Prapanca of Majapahit, 1365 AD*. Martinus Nijhoff.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010a). *Sejarah nasional Indonesia, jilid II: Zaman kuno*. Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010b). *Sejarah nasional Indonesia: Zaman pertumbuhan dan perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*. Balai Pustaka.
- Santun, D. I. M., Murni, & Supriyanto. (2010). *Iliran dan uluan: Dinamika dan dikotomi sejarah kultural Palembang*. Eja Publishers.
- Saptono, N. (2013). Permukiman kuna di kawasan Way Sekampung, Lampung, pada masa Śriwijaya. *Amerta: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 31(2), 125–139.
- Sarjiyanto. (2008). Mencermati kembali komoditas lada masa Kesultanan Banten abad XVI-XIX. *Amerta: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 26(1), 58–73.
- Sucipto, T. (2010). Eksistensi kraton di Cirebon: Kajian persepsi masyarakat terhadap keraton-keraton di Cirebon. *Patanjala*, 2(3), 472–489.
- Suhadi, M. (1998). Beberapa piagam Kesultanan Palembang. *Jurnal Arkeologi Siddhayatra, II*(1), 14–26.
- Sutrisna, D. (2014). Lampung Cikoneng, potret pemukiman orang Melayu di tanah Banten. *Naditira Widya*, 8(1), 19–28.
- Syawaluddin, M., & Fikri, M. S. (2019). *Tradisi politik Melayu: Analisis pengangkatan dan pergantian kekuasaan di Kesultanan Palembang*. CV. Amanah.
- Tuuk, H. N. van der. (1884). Lampoengsche pijagems. *Tijdschrift Voor Indische Taal-. Land-En Volkenkunde, XXIX*, 191–207.
- Untoro, H. O. (1998). *Perdagangan di Kesultanan Banten (1522-1684): Kajian arkeologi ekonomi*. Universitas Indonesia.
- Wargadalem, F. R. (2017). *Kesultanan Palembang dalam pusaran konflik (1804-1825)*. Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO.
- Westenenk, L. C. (1919). Aanteekeningen omtrent het hoornoschrift van Loeboek Blimbing. *Tijdschrift Voor Indische Taal-. Land-En Volkenkunde, LVIII*, 448–460.
- Wibisono, S. C. (2013). Bina kawasan di negeri bawah angin: Dalam perniagaan Kesultanan Banten abad XV-XVII. *Kalpataru: Majalah Arkeologi*, 22(2), 111–122.
- Wijayati, M. (2011). Jejak Kesultanan Banten di Lampung abad XVII (Analisis prasasti dalung Bojong). *Analisis*, 11(2).
<https://doi.org/10.24042/ajsk.v11i2.622>